

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

#### A. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran lembaga keuangan mikro syariah atau BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya adalah:

Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Bashul Hazami tahun 2016 Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya berjudul ” *Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.*” Hasil dari Penelitiannya Kunci sukses implementasi waqaf dalam pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin adalah;

1. keberhasilan pembentukan karakter yang dimulai dengan pembiasaan sholatnya khususnya sholat lima waktu.
2. keberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin ditentukan dalam pembiasaan mental spiritual yang berupa jiwa amanah, jujur, kerja keras dan profesional.
3. Pendampingan dan monitoring selama penerimaan pembiayaan adalah faktor kesuksesan yang dibutuhkan oleh penerima pembiayaan agar berdaya secara sosial ekonominya apabila proses ini gagal maka sangat kecil kemungkinan masyarakat miskin akan sukses diberdayakan untuk keluar dari kemiskinannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Bashlul Hazami, *Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Universitas Airlangga Surabaya. (Vol. 10, No.1, Juni 2016)

Maria Ira Susanti tahun 2015 Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Berjudul ” *Peran Koperasi Serba Usaha (Ksu) ”Mitra Maju” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat.*” Hasil dari Penelitiannya minimnya modal yang dimiliki koperasi sehingga anggota yang mengajukan permohonan pinjaman harus menunggu sampai jumlah pinjaman yang diajukan terpenuhi dan dana pinjaman yang diajukan tidak bisa ada pada saat itu juga dan semua itu tergantung dari modal yang dimiliki koperasi pada saat itu. Dan besarnya jumlah maksimal pinjaman hanya sebesar Rp.30.000.000,-; sehingga anggota yang ingin membuka usaha dengan skala yang cukup besar tidak bisa bergantung sepenuhnya pada koperasi. Selain itu kendala yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mitra Maju” adalah kurangnya wawasan maupun pengetahuan yang dimiliki oleh anggota koperasi itu sendiri.<sup>10</sup>

Khusniati Rofiah tahun 2011, Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berjudul “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo.*” Hasil penelitiannya bahwa peran BMT dan KSP dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembangunan UMK, BMT surya mandiri dan KSP berdiri sejak tahun 1997. Kemudian BMT Surya mandiri dalam pemberdayaan atau pengembangan masih berada pada tahapan inisiator belum masuk tahapan fasilitator dan pendampingan, sedangkan KSP dalam

---

<sup>10</sup> Maria Ira Susanti, *Peran Koperasi Serba Usaha (Ksu) ”Mitra Maju” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat.*, Jurnal ilmu Pemerintah, Universitas Mulawarman. (2015)

pengembangannya sudah berada pada tahapan inisiator, fasilitator dan pendampingan namun dalam segi pembiayaan ada perbedaannya yaitu BMT Surya mandiri menggunakan mudharabah dan KSP menggunakan pembiayaan bunga ringan.<sup>11</sup>

Sri Dewi Yusuf tahun 2014 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo berjudul “ *Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat.*” Hasil penelitiannya keprihatinan terhadap nasib para pelaku ekonomi lemah, harus di perhatikan dan di tanggap dengan mencari solusi yang terbaik, oleh karena itu BMT sangat berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup perekonomian lemah dengan membantu pembiayaan untuk modal atau menambah modal usaha dan dimana BMT juga sangat berperan aktif dalam membantu memberdayakan perekonomian para pelaku ekonomi lemah.<sup>12</sup>

Teuku Ahmad Yani tahun 2012 Kanun Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Berjudul “*Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Pembentukan Perusahaan Daerah Di Aceh )* . Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan beberapa urusan pilihan yang didasarkan pada potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk pelaksanaannya urusan wajib dan urusan pilihan, membentuk satuan kerja perangkat daerah, daerah pula memungkinkan pula untuk membentuk

---

<sup>11</sup> Khusniati Rofiah, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*. jurnal Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. (Volume 5 No. 1 Tahun 2011)

<sup>12</sup> Sri Dewi Yusuf, *Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat*, Jurnal Al-Mizan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo. ( Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014)

badan usaha yang dimiliki daerah. Oleh karena itu pembentukan badan usaha milik daerah perlu diawali dengan studi kelayakan terhadap bidang usaha dari badan usaha milik daerah dan prospeknya. Pembentukan badan usaha milik daerah pada bidang usaha yang tidak menguntungkan sementara itu bukan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib daerah tidak perlu dilakukan.<sup>13</sup>

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian**

No	Identitas Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Jurnal, Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Bashul Hazami tahun 2016, Berjudul “ <i>Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.</i> ”	tiga kunci sukses peran dan implementasi waqaf dalam pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah; pertama, keberhasilan pembentukan karakter yang dimulai dengan pembinaan sholatnya khususnya shalat lima waktu. Kedua, keberhasilan dalam pembinaan mental spiritual antara lain; jiwa amanah, jujur, pekerja keras dan profesional. Ketiga, pendampingan dan monitoring selama penerimaan pembiayaan.	Penelitian ini membahas peran dan implementasi waqaf sedangkan penulis membahas mengenai Peran Baitul Mal Wattamwil(BMT)

<sup>13</sup> Teuku Ahmad Yani, *Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah Di Aceh)* Kanun Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. ( No. 56, Th. XIV (April, 2012),

2	<p>Jurnal, Maria Ira Susanti tahun 2015 Berjudul " Peran Koperasi Serba Usaha (Ksu) "Mitra Maju" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat."</p>	<p>Minimnya modal yang dimiliki koperasi sehingga anggota yang mengajukan permohonan pinjaman harus menunggu sampai jumlah pinjaman yang diajukan terpenuhi dan dana pinjaman yang diajukan tidak bisa ada pada saat itu juga dan semua itu tergantung dari modal yang dimiliki koperasi pada saat itu. Dan besarnya jumlah maksimal pinjaman hanya sebesar Rp.30.000.000,-;</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai menjalankan simpan pinjam, bidang penyaluran BBM, pembagian sisa hasil usaha Sedangkan penulis membahas mengenai seberapa jauh pembiayaan akan berpengaruh dengan peran BMT dalam tingkat kesejahteraan</p>
3	<p>Jurnal, Khusniati Rofiah tahun 2011, Berjudul "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo."</p>	<p>Lembaga keuangan mikro menunjukkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana (pembiayaan) masuk dalam tahapan inisiator saja, belum masuk pada tahapan fasilitator dan pendampingan. Sedangkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh KSP Baku Makmur dalam bentuk inisiator, fasilitator dan pendampingan, dilaksanakan dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana, dilanjutkan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kelompok ekonomi perempuan-berkaitan dengan manajemen usaha anggota dan ekonomi rumah tangga.</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai perbandingan pengembangan BMT surya mandiri dan KSP Baku makmur dalam segi pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi. Sedangkan penulis membahas mengenai dalam segi pembiayaan akan berpengaruh tidak dengan tingkat kesejahteraan</p>

4	Jurnal, Sri Dewi Yusuf tahun 2014 berjudul “ Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat.”	keprihatinan terhadap nasib para pelaku ekonomi lemah, harus di perhatikan dan di tanggapi dengan mencari solusi yang terbaik, oleh karena itu BMT sangat berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup perekonomian lemah dengan membantu pembiayaan untuk modal atau menambah modal usaha dan dimana BMT juga sangat berperan aktif dalam membantu memberdayakan perekonomian para pelaku ekonomi lemah	Penelitian ini membahas mengenai strategi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat sedangkan penulis membahas mengenai Peran BMT dalam Meningkatkan kesejahteraan
5	Jurnal, Teuku Ahmad Yani tahun 2012 Berjudul “ <i>Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah Di Aceh).</i> ”	Pembentukan Badan Usaha milik daerah perlu diawali dengan studi kelayakan terhadap bidang usaha dari badan usaha milik daerah dan prospeknya. Pembentukan badan usaha milik daerah pada bidang usaha yang tidak menguntungkan sementara itu bukan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib daerah tidak perlu dilakukan	Penelitian ini membahas mengenai Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sedangkan penulis membahas mengenai Peran BMT dalam Meningkatkan kesejahteraan

## B. Kerangka Teoritik

### 1. Baitul Mal Wattamwil (BMT)

#### a. Pengertian Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Baitul Mal Wattamwil di artikan dalam garis besar indonesia sebagai lembaga *non profit* dan lembaga *profit*, Baitul Mal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana *non profit* seperti zakat, infaq, Shadaqah dan wakaf. Baitul Mal juga melakukan pengembangan terhadap masyarakat dengan adanya

program kegiatan menabung, investasi dan pembiayaan kegiatan ekonomi. sedangkan menurut bahasa ialah BMT berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu Baitul Mal yang berarti rumah harta dan Baituttamwil yang berarti rumah bisnis atau usaha.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Baitul Mal Wattamwil bergerak dalam program yang bertujuan untuk melakukan pembiayaan modal dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti menabung, investasi dan menghimpun dana sosial seperti zakat ,infak,shadaqah dan wakaf (ZISWAF).

Sedangkan kegiatan Baitul Mal Wattamwil yang bersifat bisnis yaitu lembaga yang menjadi penyalur dana dan penghimpun dana adapun beberapa produk pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil yaitu ada akad mudharabah, murabahah, ijarah, musyarakah, Qardh, Ar-Rahn, salam dan istishna yang semuanya itu dalam operasionalnya berlandaskan prinsip syariah dengan tanpa adanya bunga yang berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.<sup>15</sup>

Pada prinsipnya BMT di gunakan oleh masyarakat secara umum untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan seksama sehingga terwujudnya sosial yang adil dan tidak bisa berdiri sendiri,

<sup>14</sup> Nawawi, I. (2009). Ekonomi Kelembagaan Syariah. Surabaya: Putra Media Nuasnta. Hal 90

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,(Bandung: Cordoba,2016) Hal. 47

dalam firman QS Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Tolong-menolong lah dalam hal kebaikan dan tidak diperkenankan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa”*.<sup>16</sup>

Dalam firman QS Al-Maidah tersebut dapat di pahami bahwa saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari di perintahkan oleh Allah.

b. Visi dan Misi BMT (Baitu Mal Wattamwil)

Visi BMT secara umum yaitu mengarah pada upaya mewujudkan BMT mampu menjadikan kualitas ibadah anggota dalam arti yang luas, dalam hal sebagai perwakilan atau abdi kepada Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota khususnya dan masyarakat. Titik tekan terhadap visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas, yakni tidak mencakup terhadap aspek sholat namun mencakup aspek kehidupan sosial sehingga BMT wajib berorientasi mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.<sup>17</sup>

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian struktur masyarakat madani yang adil serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan Ridho Allah SWT.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid hal 106

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, manajemen Baitul Mal wattamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal 121-122

<sup>18</sup> Ibid, hal.122

Dari pengertian Misi BMT bahwa misi BMT bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dan penumpukan terhadap golongan orang kaya namun lebih berorientasi atau pendistribusian merata kepada pembagian yang adil sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Masyarakat kelas bawah harus di dorong agar dapat melakukan pembiayaan dan penyertaan modal ke BMT sehingga dapat merasakan hasil-hasil dari BMT tersebut. struktur masyarakat yang madani dan adil itu dulu di bangun oleh nabi Muhammad SAW di Madinah, pada waktu itu kehidupan umat islam hidup dengan lancar dan damai kehidupan ekonomi sangat berkembang kemudian umat islam diwajibkan untuk zakat atau jizyah dan pendistribusian ke Negara dapat merata dan adil.<sup>19</sup>

c. Tujuan BMT

Lembaga ekonomi mikro terfokus kepada peningkatan kualitas usaha ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemberian pembiayaan modal, dalam mencapai tujuan tersebut ada beberapa fungsi sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, dan mendorong serta mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.

---

<sup>19</sup> Ibid, hal.122

<sup>20</sup> Nawawi, I. (2009). *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: Putra Media Nusantara Hal 103

2. Meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
  3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
  4. Menjadi perantara keuangan antara aghniya sebagai shohibul maal dengan dhu'afa sebagai mudharib terutama untuk dana sosial seperti zakat, infak, sadaqah, wakaf, hibah dan lainnya.
  5. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemilik modal maupun menyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.<sup>21</sup>
- d. Peran BMT (Baitul Mal Wattamwil)

Peran Baitul Mal Wattamwil secara umum adalah melakukan atau mengatasi adanya masyarakat yang ingin melakukan suatu kegiatan usaha atau dalam simpan pinjam. Namun tidak berperan terhadap bidang ekonomi, tetapi berperan terhadap pembinaan agama pada nasabah sektor jasa keuangan BMT, selain itu juga BMT agar dapat memperkuat sector sosial dalam menyalurkan ZIS-nya ke Pihak Baitul Mal Wattamwil (BMT) Adapun beberapa peran Baitul Mal wattamwil (BMT) sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid hal 103

<sup>22</sup> Nawawi, I. (2009). *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: Putra Media Nuasnta, hal 102

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, BMT harus melakukan peran aktif dalam mensosialisasikan tentang ekonomi islam di tengah-tengah masyarakat dan mengadakan pelatihan mengenai transaksi islami.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan untuk usaha kecil.kaitan BMT harus aktif menjalankan sebagai lembaga keuangan mikro untuk mengadakan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap kegiatan nasabah.
3. Melepaskan masyarakat terhadap ketergantungan adanya rentenir. BMT harus mampu memberi pelayanan dengan baik agar bisa mendapatkan simpati masyarakat.
4. Mengutamakan keadilan ekonomi masyarakat dengan mengadakan distributif yang adil dan merata. Sehingga BMT dapat melakukan evaluasi dalam pemetaan skala prioritas yang dapat di perhatikan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid hal 102

## 2. Kesejahteraan

### a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan social adalah orang yang di katakan sejahtera apabila ia terhindar dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga aman dan tentram dalam hidupnya, kesejahteraan berasal dari kata “*sejahtera*” sedangkan menurut bahasa sansekerta yaitu “*catara*” artinya payung.<sup>24</sup> secara kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aman dan sentosa.<sup>25</sup>

Menurut UU No.11 Tahun 2009 tidak diperjelas mengenai pengertian kesejahteraan namun dalam lebih menegaskan atas hak-hak asasi manusia dalam kesejahteraannya kemudian di UU No.6 tahun 1974 menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan,spiritual dan kelayakan semestinya bagi masyarakat.<sup>26</sup>

### b. Tujuan Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Apabila sudah di katakan sejahtera bila sudah memenuhi kebutuhan sandang, pangan,kesehatan dan social lainnya yang berhubungan dengan adanya kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>24</sup>Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.hal 8

<sup>25</sup> <http://kbbi.web.id> di akses kamis 10 Agustus 2017

<sup>26</sup> UU No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat 1 dan UU No.11 tahun 2009

2. Untuk mencapai penyesuaian diri dan masyarakat dalam hal kesejahteraan di lingkungan dengan menggali sumber daya sehingga dapat memuaskan taraf hidupnya.<sup>27</sup>

c. Hubungan Kesejahteraan dengan Kemiskinan

Kesejahteraan sangat berhubungan dengan kemiskinan karena apabila sudah dikatakan sejahtera sudah terbebas dari kemiskinan yang mana sudah tercukupi kebutuhannya dari segi pangan, sandang. Adapun ukuran kemiskinan di kota Yogyakarta Aliansi Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan atau dikenal dengan nama program SAPA (*Strategic Alliance for Poverty Alleviation*) Garis kemiskinan di Yogyakarta mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta merilis garis kemiskinan bulan Maret 2015 hingga Maret 2016 mengalami kenaikan sekitar 5,42 persen. Bulan Maret 2015 lalu, garis kemiskinan Yogyakarta sebesar Rp 335.886 per kapita per bulan, namun bulan Maret 2016 naik menjadi Rp 354.084 per kapita per bulan.<sup>28</sup>

Kemiskinan terbagi menjadi dua kategori kemiskinan yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif. Definisi kedua kategori kemiskinan tersebut yang di ungkapkannya sebagai berikut:

- *Kemiskinan absolute adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.*
- *Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan suatu daerah.*

<sup>27</sup> Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. hal 10

<sup>28</sup> <http://www.sapa.or.id> di akses pada Kamis 10 Agustus 2017

Kemiskinan bukan berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multi dimensional karena dalam kemiskinan ada halnya yang berkaitan yaitu masalah sosial, budaya dan politik, kemudian kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi namun juga berurusan dengan kesejahteraan sosial.<sup>29</sup>

d. Fungsi-fungsi Kesejahteraan

Fungsi kesejahteraan berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan yang mengakibatkan perubahan ekonomi, sosio sehingga terjadinya konsekuensi sosial yang negative kemudian menciptakan kondisi untuk mampu mendorong masyarakat, fungsi kesejahteraan antara lain :<sup>30</sup>

1) Fungsi pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat dan individu-individu dalam masalah sosial, dilakukan untuk pencegahan terhadap pola-pola sosial dan lembaga baru.

2) Fungsi penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan untuk menghilangkan kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial.

3) Fungsi pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan untuk membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pengembangan dan tatanan sumber daya.

---

<sup>29</sup> Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. JMPK Vol. 08/No.03/September/, 9.

<sup>30</sup>Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. hal 12-13

#### 4) Fungsi penunjang (*Supportive*)

Kesejahteraan yang berfungsi untuk membantu dalam hal peningkatan pencapaian sector atau pelayanan kesehatan.<sup>31</sup>

#### e. Indikator-indikator kesejahteraan

Indikator kesejahteraan berkait dengan kemiskinan karena seseorang digolongkan miskin atau tidak jika seberapa jauh indikator-indikator kesejahteraan tersebut telah dipenuhi. Indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi moneter yaitu pendapatan dan pengeluaran. disamping itu melalui dimensi moneter, kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi non moneter misalnya kesehatan, pendidikan dan partisipasi sosial.<sup>32</sup>

Adapun dengan hal ini penjelasan dimensi yaitu Dimensi Moneter biasanya diukur melalui dimensi moneter, namun demikian kesejahteraan juga bisa diukur melalui dimensi non moneter. Sehingga terjadi karena kesejahteraan tidak hanya mencakup dimensi ekonomi saja tetapi juga dimensi non ekonomi, yaitu sosial, budaya, dan politik, misalnya kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, hak suara, tingkat melek huruf, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Indikator-indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat diukur dari beberapa aspek yang meliputi delapan bidang yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan

---

<sup>31</sup> Ibid Hal 13

<sup>32</sup> <https://jogjakota.bps.go.id> di akses pada kamis 10 agustus 2017

<sup>33</sup> Aminullah, R. A. (2009). Peranan Baitu mal Wattamwil untuk mencapai kesejahteraan Anggotannya (Studi Kasus Pada Baitul Mal wattamwil (BMT) Darussalam Ciamis Jawa Barat.

kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan mendapatkan kemudahan fasilitas transportasi. Adapun penentuan setiap kriteria adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria pendapatan yang dinilai berhubungan dengan kondisi usaha dan penyedia lapangan kerja.
- 2) Kriteria tempat tinggal yang dinilai berhubungan dengan rumah yang layak huni atau tidak.
- 3) Fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 4 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, penerangan, bahan bakar untuk memasak.
- 4) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan berhubungan dengan jarak rumah sakit terdekat .
- 5) Kriteria kemudahan memasukkan anak ke jenjang sekolah.<sup>34</sup>

Mengenai aspek-aspek sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah: *Pertama*, Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas. *Kedua*, Kesehatan, yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan bagi kehidupan dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita. *Ketiga*, Pendidikan, yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas pendidikan.<sup>35</sup>

*Kempat*, Ketenagakerjaan, yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja

---

<sup>34</sup> <https://jogjakota.bps.go.id> di akses pada Kamis 10 Agustus 2017

<sup>35</sup> Sodik, A. (2015). Konsep kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember, 387-388

dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak. *Kelima*, Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan). *Keenam*, Perumahan dan Lingkungan, yang meliputi kualitas rumah (tempat tinggal), fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan. *Ketujuh*, Sosial budaya, yang meliputi akses untuk memperoleh informasi dan hiburan, dan kegiatan sosial budaya.

f. Konsep dan definisi Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Untuk pengukuran kemiskinan badan pusat statistik menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep berikut tidak hanya di gunakan oleh BPS aja namun di Negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone dan Gambia.<sup>36</sup> dengan pendekatan berikut ini :

**Kemiskinan** dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makana dan non makanan yang di ukur dari pengeluaran.

---

<sup>36</sup> [www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id) di akses pada jumat 10 November 2017 Pukul 05.15

**Penduduk Miskin** adalah penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK)/ *poverty line*.

#### **Garis kemiskinan (GK)**

Garis kemiskinan di bagi dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Untuk perhitungan garis kemiskinan dengan cara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

#### **Garis kemiskinan Makanan (GKM)**

Garis kemiskinan makanan merupakan suatu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang dapat disertakan sama 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

#### **Garis kemiskinan Non Makanan (GKNM)**

Garis kemiskinan non makanan yaitu kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Untuk komoditi ini kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi perkotaan dan 47 jenis komoditi pedesaan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid

### Ukuran Kemiskinan

- a. **Head Count Index (HCI-Po)** yaitu presentase penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan (GK).
- b. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)** yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin nilai indeksnya tinggi maka rata-rata semakin jauh untuk pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. **Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2)** yaitu ukuran antara penduduk miskin. tingginya nilai indeks, maka tinggi juga ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

#### Perhitungan Indikator Kemiskinan

Suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan rumus sebagai berikut <sup>38</sup> :

$$Pa = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right] a$$

Keterangan :

a = 0.1.2

z = Garis Kemiskinan

y<sub>i</sub> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...,q), y<sub>i</sub><z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah Penduduk

---

<sup>38</sup> [www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id) di akses pada jumat 10 November 2017 Pukul 18.00

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan terbagi menjadi dua hal berikut.<sup>39</sup>

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu di perlukan untuk peningkatan usaha, peningkatan produksi dan investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif terbagi menjadi dua hal berikut.

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu sejumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi; dan b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang erat kaitanya dengan pembiayaan investasi.

---

<sup>39</sup> Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema insani, 2001) hal.160-161

b. Pembiayaan konsumtif di gunakan untuk pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini.<sup>40</sup>

1. *Al-bai bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
2. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
3. *Al-musyarakah mutanaqishah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa

---

<sup>40</sup> Ibid hal 168